

PARADOKS SUMBER DAYA ALAM: PENGARUH DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM, KETIMPANGAN EKONOMI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KAYA SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Natural Resource Paradox: The Effect of Natural Resource Revenue Sharing, Economic Inequality, and Human Development Index on Economic Growth in Resource-Rich Provinces in Indonesia

Alifah Putri Eriza¹, Zulfa Emalia²

^{1,2}Universitas Lampung, Indonesia

¹Email: alifaheriza@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of Natural Resource Revenue Sharing (DBH-SDA), economic inequality measured by the Gini Index, and the Human Development Index (HDI) on economic growth in resource-rich provinces in Indonesia. The phenomenon of the natural resource paradox indicates that abundant natural resources do not necessarily lead to improved welfare. This study employs a quantitative approach using panel data from selected resource-rich provinces during the 2017–2023 period. The analytical method used is panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM). The results show that DBH-SDA has no significant effect on economic growth, economic inequality has a negative effect, while HDI has a positive and significant effect on economic growth. These findings suggest that human development plays a more crucial role than natural resource dependence in driving sustainable economic growth.

Keywords: *natural resource revenue sharing, inequality, HDI, economic growth, resource curse*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), ketimpangan ekonomi yang diukur menggunakan Indeks Gini, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kaya sumber daya alam di Indonesia. Fenomena paradoks sumber daya alam menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari beberapa provinsi kaya sumber daya alam selama periode 2017–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH-SDA memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dibandingkan ketergantungan pada sumber daya alam.

Kata kunci: *DBH SDA, ketimpangan ekonomi, IPM, pertumbuhan ekonomi, resource curse*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks negara berkembang, ketersediaan sumber daya alam sering kali dianggap sebagai modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sektor ekstraktif sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sektor seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, serta kehutanan telah lama menjadi kontributor penting dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

Namun demikian, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai paradoks sumber daya alam atau *natural resource curse*, di mana negara atau daerah yang kaya sumber daya justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dapat diamati pada beberapa provinsi kaya sumber daya alam yang masih menghadapi permasalahan ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki melalui mekanisme transfer fiskal, salah satunya melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Secara teoritis, DBH-SDA diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata. Peningkatan penerimaan daerah dari DBH-SDA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif. Namun dalam praktiknya, efektivitas pemanfaatan DBH-SDA dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan kualitas tata kelola dan alokasi anggaran daerah.

Selain faktor fiskal, ketimpangan ekonomi juga menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan terbatasnya daya beli masyarakat dan rendahnya partisipasi ekonomi. Di daerah kaya sumber daya alam, ketimpangan sering kali muncul akibat distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata dari sektor ekstraktif, yang cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa modal manusia merupakan faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Daerah dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik cenderung memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Dalam konteks

daerah kaya sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah kekayaan sumber daya tersebut dapat diolah menjadi nilai tambah ekonomi yang optimal.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa sumber daya alam memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian lainnya justru menunjukkan adanya dampak negatif atau tidak signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas institusi, tingkat ketimpangan, dan pembangunan manusia.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi penting dengan mengintegrasikan tiga variabel utama, yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), ketimpangan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam satu model analisis untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di provinsi kaya sumber daya alam di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah yang memiliki karakteristik ketergantungan terhadap sumber daya alam.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam hal penggunaan data panel terbaru periode 2017–2023 yang mencerminkan kondisi terkini perekonomian daerah pasca berbagai dinamika global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan dampak pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, ketimpangan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kaya sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selama periode 2017–2023. Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi yang memiliki karakteristik sebagai daerah kaya sumber daya alam di Indonesia.

Pendekatan data panel dipilih karena mampu menangkap variasi data antar wilayah dan antar waktu secara simultan, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan data cross section atau time series saja. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara

itu, variabel independen terdiri dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), ketimpangan ekonomi yang diukur menggunakan Indeks Gini, serta kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai variabel yang digunakan, definisi operasional variabel disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan
Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan PDRB riil	Persen (%)
DBH-SDA	Dana transfer dari pusat terkait SDA	Miliar Rupiah
Indeks Gini	Tingkat ketimpangan pendapatan	0–1
IPM	Indeks pembangunan manusia	Indeks

Model umum dari regresi data panel dalam penelitian ini mengacu pada model penelitian yang digunakan oleh Sachs & Warner, sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 DBH_{it} + \beta_2 GINI_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi provinsi i tahun t
- DBH_{it} = Dana Bagi Hasil (DBH)
- GINI_{it} = Indeks Gini (Ketimpangan Ekonomi)
- IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- α = konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi
- ϵ_{it} = *error term*
- i = *Cross section*
- t = *Time series*

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, diperlukan pengujian untuk menentukan model terbaik.

Pengujian pertama dilakukan menggunakan uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM. Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM. Terakhir, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan CEM dan REM.

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Hasil	Keputusan
Chow Test	Signifikan	FEM lebih baik
Hausman Test	Signifikan	FEM dipilih
LM Test	Tidak dominan	FEM tetap digunakan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar provinsi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, untuk memastikan validitas model, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi dasar regresi sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diawali dengan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang digunakan. Data menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antar provinsi dalam hal penerimaan DBH-SDA, tingkat ketimpangan ekonomi, serta kualitas pembangunan manusia.

Tabel 3. DBH-SDA Provinsi Kaya SDA (2017–2023)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Timur	176,01	81,78	61,5	84,79	51,78	216,48	76,32
Kalimantan Selatan	33,22	27,86	40,03	27,97	14,29	77,43	49,85
Sumatera Selatan	78,36	39,85	36,77	43,91	39,87	69,22	49,71
Riau	11,75	3,94	4,61	6,39	4,97	7,58	3,11
Papua Barat	1,89	16,63	14,81	3,67	5,22	5	0,28

Data tersebut menunjukkan bahwa DBH-SDA mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, terutama pada provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif seperti Kalimantan Timur.

Tabel 4. Rata-Rata Indeks Gini

Provinsi	Indeks Gini
Kalimantan Timur	0.330
Papua Barat	0.381
Sulawesi Tenggara	0.391
Maluku Utara	0.306

Tingkat ketimpangan ekonomi di beberapa provinsi menunjukkan angka yang relatif tinggi, terutama di wilayah dengan aktivitas ekstraktif yang dominan.

Tabel 5. Rata-Rata IPM

Provinsi	IPM
Kalimantan Timur	76.52

Provinsi	IPM
Riau	73.05
Papua Barat	65.38
Maluku Utara	69.21

Data menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia masih bervariasi antar wilayah.

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Estimasi Random Effect Model

Komponen dalam Random Effect Model (REM)

No	Komponen	Notasi	Penjelasan
1	Variabel dependen	Y_{it}	Variabel terikat yang diamati pada unit individu ke-i dan waktu ke-t
2	Variabel independen	X_{1it}, X_{2it}	Variabel bebas yang memengaruhi Y_{it} pada unit i dan waktu t
3	Intersep	β_0	Nilai konstanta umum dari seluruh unit observasi
4	Koefisien regresi	β_1, β_2	Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
5	Efek individu (random)	μ_i	Komponen error yang mencerminkan perbedaan karakteristik antar individu
6	Error idiosinkratik	ϵ_{it}	Error yang bervariasi antar waktu dan individu
7	Error gabungan	ν_{it}	Gabungan dari $\mu_i + \epsilon_{it}$

Bentuk Persamaan Random Effect Model

No	Persamaan	Keterangan
1	$Y_{it} = \beta_0 + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it}$	Bentuk dasar model dengan pemisahan komponen error

No	Persamaan	Keterangan
2	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + (\epsilon_{it} + \mu_i) Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it} + \mu_i$	Bentuk dengan penggabungan komponen error
3	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \nu_{it} Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \nu_{it}$	Bentuk sederhana dengan error gabungan

Mengasumsikan bahwa variasi antar individu bersifat random dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel ketika terdapat kemungkinan bahwa gangguan (*error*) memiliki hubungan antar waktu maupun antar individu. Dalam pendekatan *random effect*, variasi antar wilayah dan waktu tidak dimodelkan secara eksplisit melalui parameter tetap, melainkan dimasukkan ke dalam komponen error. Setiap unit individu diasumsikan memiliki nilai intersep yang berbeda, dan perbedaan ini berlaku untuk seluruh pengamatan dalam unit tersebut. Salah satu kelebihan model ini adalah kemampuannya dalam mengurangi masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang disajikan pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5, terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antar provinsi dalam hal penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), tingkat ketimpangan ekonomi, serta kualitas pembangunan manusia. Variasi ini mencerminkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan struktur pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Pada Tabel 3, data menunjukkan bahwa penerimaan DBH-SDA di provinsi kaya sumber daya alam mengalami fluktuasi yang cukup tinggi selama periode 2017–2023. Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan nilai DBH-SDA tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, meskipun mengalami penurunan yang signifikan pada beberapa tahun tertentu sebelum kembali meningkat secara tajam pada tahun 2022. Pola fluktuatif ini juga terlihat pada provinsi lain seperti Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Sementara itu, provinsi seperti Riau dan Papua Barat menunjukkan nilai DBH-SDA yang relatif lebih rendah dan cenderung tidak stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global dan tingkat produksi sektor ekstraktif di masing-masing daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4 yang menyajikan rata-rata Indeks Gini, terlihat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antar provinsi masih tergolong cukup tinggi. Papua Barat dan Sulawesi Tenggara memiliki nilai Indeks Gini yang relatif lebih besar dibandingkan provinsi lainnya, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, Maluku Utara menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam tidak selalu diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata di masyarakat.

Pada Tabel 5, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antar wilayah. Kalimantan

Timur memiliki nilai IPM tertinggi, diikuti oleh Riau, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik. Di sisi lain, Papua Barat memiliki nilai IPM terendah, yang menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara merata.

Lebih lanjut, hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM) sebagaimana disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengakomodasi variasi antar individu dan waktu melalui komponen error. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar provinsi bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, variasi yang tidak teramati antar wilayah dimasukkan ke dalam komponen error individu, sedangkan variasi yang terjadi sepanjang waktu ditangkap oleh error idiosinkratik.

Penggunaan REM dalam penelitian ini memberikan hasil estimasi yang lebih efisien karena tidak memerlukan pembentukan variabel dummy untuk setiap unit observasi. Selain itu, model ini juga mampu mengurangi potensi masalah heteroskedastisitas yang sering muncul dalam data panel. Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa pendekatan Random Effect Model relevan digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel penelitian terhadap kondisi ekonomi dan pembangunan antar provinsi, dengan tetap mempertimbangkan adanya heterogenitas yang bersifat acak di setiap wilayah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kaya sumber daya alam di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sumber penerimaan fiskal dari sektor ekstraktif belum mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam transformasi kekayaan sumber daya alam menjadi output ekonomi yang produktif.

Secara teoritis, DBH-SDA seharusnya meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas belanja pembangunan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan DBH-SDA tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam mekanisme transmisi fiskal, di mana tambahan pendapatan daerah tidak sepenuhnya dialokasikan pada kegiatan yang produktif.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka *natural resource curse*, yang menekankan bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam dapat menciptakan distorsi dalam struktur ekonomi dan kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, DBH-SDA justru berpotensi menciptakan efek “fiscal complacency”, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah menjadi kurang terdorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maupun mengembangkan sektor ekonomi

lain. Akibatnya, struktur ekonomi daerah menjadi kurang terdiversifikasi dan terlalu bergantung pada sektor ekstraktif yang bersifat volatil.

Fluktuasi DBH-SDA yang terlihat pada data, terutama pada provinsi seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa penerimaan daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global. Ketika harga komoditas meningkat, penerimaan daerah juga meningkat, namun kondisi ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan investasi jangka panjang. Sebaliknya, ketika harga komoditas menurun, perekonomian daerah menjadi rentan terhadap kontraksi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap DBH-SDA dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui fenomena *Dutch Disease*, di mana dominasi sektor sumber daya alam menyebabkan sektor ekonomi lain, seperti industri manufaktur dan jasa, menjadi kurang berkembang. Ketika sektor ekstraktif memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, alokasi sumber daya seperti tenaga kerja dan investasi cenderung terfokus pada sektor tersebut. Akibatnya, sektor lain yang memiliki potensi nilai tambah tinggi tidak berkembang secara optimal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata menjadi salah satu faktor struktural yang menghambat efektivitas pembangunan ekonomi di daerah kaya sumber daya alam. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak bersifat inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan yang tinggi di daerah kaya sumber daya alam dapat dijelaskan melalui pola distribusi manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif yang cenderung terkonsentrasi. Aktivitas ekonomi pada sektor ini umumnya bersifat padat modal dan tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, keuntungan dari sektor ekstraktif sering kali dinikmati oleh kelompok tertentu atau perusahaan besar, sehingga tidak menciptakan efek pemerataan dalam perekonomian daerah. Data Indeks Gini yang relatif tinggi pada beberapa provinsi menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan masih menjadi permasalahan yang signifikan.

Dari perspektif makroekonomi, ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan efektivitas pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Pertama, ketimpangan mengurangi daya beli masyarakat secara agregat karena sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi yang memiliki kecenderungan konsumsi lebih rendah. Kedua, ketimpangan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya menghambat akumulasi modal manusia. Ketiga, ketimpangan dapat memicu ketidakstabilan sosial yang berdampak negatif terhadap iklim investasi.

Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan bahwa distribusi pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat proses akumulasi modal manusia karena sebagian masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan

demikian, ketimpangan tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menjadi hambatan struktural dalam pembangunan ekonomi.

Berbeda dengan DBH-SDA dan ketimpangan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, khususnya di daerah yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam.

Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, modal manusia merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, yang secara langsung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih terdidik dan sehat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan efisiensi produksi, serta menciptakan inovasi dalam perekonomian.

Data IPM menunjukkan adanya kesenjangan antar provinsi, di mana daerah dengan IPM yang lebih tinggi memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dalam konteks daerah kaya sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan apakah kekayaan sumber daya tersebut dapat diolah menjadi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, pembangunan manusia juga berperan dalam mendorong transformasi struktural ekonomi. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang baik memiliki kemampuan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif serta meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena paradoks sumber daya alam di Indonesia masih relevan, di mana kekayaan sumber daya alam belum mampu diterjemahkan secara optimal menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa faktor kelembagaan, distribusi pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan ketersediaan sumber daya alam itu sendiri.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta pengurangan ketimpangan ekonomi. Selain itu, pengelolaan DBH-SDA perlu difokuskan pada pembiayaan sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan menjadi kunci dalam mengatasi fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang beragam serta mencerminkan adanya

indikasi fenomena natural resource curse dalam perekonomian daerah. Variabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan DBH SDA cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pengaruh tersebut hanya signifikan pada tingkat signifikansi 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa peran DBH SDA dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang optimal, yang merupakan salah satu ciri dari fenomena *natural resource curse*.

Variabel ketimpangan ekonomi yang diukur dengan Indeks Gini memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Kondisi ini memperkuat indikasi *natural resource curse*, di mana daerah yang kaya sumber daya alam justru menghadapi permasalahan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum mampu secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian. Fenomena ini juga sejalan dengan karakteristik *natural resource curse*, di mana dominasi sektor ekstraktif cenderung mengurangi peran modal manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia belum memberikan dampak yang optimal. Secara serentak, variabel DBH SDA, Indeks Gini, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, hal tersebut belum tentu menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih optimal untuk menghindari dampak negatif dari fenomena *natural resource curse*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., & Emalia, Z. (2022). *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam Dan Natural Resource Curse Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera*.
- Arezki, R., & Brückner, M. (2011). *Oil Rents, Corruption, And State Stability: Evidence From Panel Data Regressions*.
- Artha Graciela Pandiangan, Dominic Savio Priyarsono, & Mutiara Probokawuryan. (2021). Impact Of Village Funds On The Gap The Human Development Index In Rural-City Areas In Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 10(2), 134–153. <https://doi.org/10.29244/Jekp.10.2.2021.134-153>
- Auty, R. M. (2001). *Resource Abundance And Economic Development*. [Http://ageconsearch.umn.edu](http://ageconsearch.umn.edu)
- Auty. (1993). *SUSTAINING DEVELOPMENT IN MINERAL ECONOMIES*.

- Baland, J.-M., & Francois, P. (2000). *Rent-Seeking And Resource Booms* (Vol. 61). Www.Elsevier.Comrlocatereconbase
- Haris. (2022). *THE DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA WITH GREEN ECONOMY AS THE MODERATING VARIABLE*.
- Hidayat, B. A., Apriliana, T., Faturohim, A., Wahyuni, R. N. T., Landekumandang, F., Judijanto, L., Rahmawati, T., Hamzah, A.,
- Joko Tri Haryanto. (2018). JURNAL BPPK IS THE CURSE OF NATURAL RESOURCES OCCURING IN INDONESIA? A PRELIMINARY FINDING. In *Jurnal BPPK* (Vol. 11, Issue 1).
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic Growth And Sustainable Development In Indonesia: An Assessment *. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 339–361. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1450962>
- Lewis, B. D. (1998). INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT SPENDING, TAXING AND SAVING Indonesian Local Government Spending, Taxing And Saving: An Explanation Of Pre-And Post-Decentralization Fiscal Outcomes*. In *Asian Economic Journal* (Vol. 12, Issue 3).
- Loayza, N., Mier, A., & Rigolini, T. J. (2013). *Poverty, Inequality, And The Local Natural Resource Curse*.
- Masi, T., Savoia, A., & Sen, K. (2020). *Is There A Fiscal Resource Curse? Resource Rents, Fiscal Capacity, And Political Institutions In Developing Economies* (Vol. 2020). UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/767-5>
- Mazwan, M. Z., & Tain, A. (2024). Analisis Environmental Kuznets Curve (Menyeimbangkan Industri Hijau Dan Degradasi Lingkungan Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 9(6), 561–572. <https://doi.org/10.37149/Jimdp.V9i6.1627>
- Pigou. (1920). *The Economics Of Welfare*.
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021a). Fenomena Natural Resource Curse Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163. <https://doi.org/10.21002/Jepi.2021.10>
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021b). Fenomena Natural Resource Curse Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163. <https://doi.org/10.21002/Jepi.2021.10>
- Ross, M. L. (2001). *DOES OIL HINDER DEMOCRACY?*
- Ross, M. L., & Myers, J. J. (2012). *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes The Development Of Nations Public Affairs*. <http://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20120301/in...>
- Rosser, A. (2007). Escaping The Resource Curse: The Case Of Indonesia. In *Journal Of Contemporary Asia* (Vol. 37, Issue 1).
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). *NATURAL RESOURCE ABUNDANCE AND ECONOMIC GROWTH*.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). *The Curse Of Natural Resources*.
- Sachs, J., Warner, A., & Rosenberg, J. (2021). *Critical Analysis Of: Natural Resources And Economic Development: The Curse Of Natural Resources*.



- Salma Fauziah, R. T. (2022). *Garuda2954785*.
- Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2020). *Economic Development*. Pearson.
- UNDP. (2020). *The Next Frontier Human Development And The Anthropocene Human Development Report 2020*. <https://Ssrn.Com/Abstract=4418010>
- Wahyudi, H., & Palupi, W. A. (2023). Natural Resources Curse In Indonesia. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 13(2), 349–356. <https://Doi.Org/10.32479/Ijeep.14077>
- World Bank. (2014). *Indonesia: Avoiding The Trap Poverty Reduction And Economic Management Department East Asia And Pacific Region*.
- Yolanda, Y., & Saksono, H. (2024). Local Government Development Policy: Natural Resource Revenue Sharing And Economic Growth In Indonesia. *Journal Of Infrastructure, Policy And Development*, 8(15), 10375. <https://Doi.Org/10.24294/Jipd10375>